



**Khairani Alawiyah<sup>1</sup>**  
**Matondang<sup>1</sup>**  
**Ellyka Evitasari<sup>1</sup>**  
**Purba<sup>2</sup>**  
**Muammar El Zaidan<sup>3</sup>**  
**Diana Winata Lumban Gaol<sup>4</sup>**

## ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DALAM PENGANGGARAN DAERAH

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan akuntansi sektor publik dalam proses penganggaran. Penelitian ini membahas peran akuntansi sektor publik dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan fokus pada penerapan akuntansi berbasis akrual. Akuntansi sektor publik sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Dengan sistem akuntansi yang tepat, pemerintah daerah dapat menyusun laporan keuangan yang akurat dan komprehensif, mendukung pengambilan keputusan yang efektif, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran. Meskipun demikian, penerapan prinsip-prinsip akuntansi ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya pemahaman aparatur pemerintah tentang akuntansi berbasis akrual, keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi yang kurang memadai, dan intervensi politik dalam penganggaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif kepustakaan untuk menganalisis tantangan-tantangan tersebut dan mengidentifikasi solusi yang dapat diterapkan, seperti peningkatan kompetensi SDM, investasi dalam teknologi informasi, penyederhanaan proses birokrasi, dan penguatan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual dapat memberikan dampak positif pada transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Dengan laporan keuangan yang lebih akurat, masyarakat dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap penggunaan anggaran. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki sistem akuntansi sektor publik agar lebih optimal dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien.

**Kata Kunci:** Akuntansi Sektor Publik, Penganggaran Daerah, Transparansi, Akuntansi Berbasis Akrual, Tantangan Implementasi

### Abstract

This study aims to analyze in depth the application of public sector accounting in the budgeting process. This study discusses the role of public sector accounting in local financial management, with a focus on the application of accrual-based accounting. Public sector accounting is very important to ensure transparency and accountability in the use of public funds. With the right accounting system, local governments can prepare accurate and comprehensive financial reports, support effective decision-making, and improve the efficiency of budget management. However, the application of these accounting principles faces various challenges, including low understanding of accrual-based accounting by government officials, limited human resources, inadequate technological infrastructure, and political intervention in budgeting. This study uses qualitative literature methods to analyze these challenges and identify solutions that can be implemented, such as improving HR competency, investing in information technology, simplifying bureaucratic processes, and strengthening regulations. The results of the study indicate that the application of accrual-based accounting can have a positive impact on transparency and accountability of local finances. With more accurate financial reports, the

<sup>1,2,3,4)</sup> Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan  
 email: alawiyah@unimed.ac.id<sup>1</sup>, ellykapurba@gmail.com<sup>2</sup>, mzaydhan12@gmail.com<sup>3</sup>,  
 dianalumbangaol@gmail.com<sup>4</sup>

public can carry out more effective supervision of budget use. This research is expected to contribute to improving the public sector accounting system to be more optimal in supporting transparent, accountable, and efficient regional financial management.

**Keywords:** Public Sector Accounting, Regional Budgeting, Transparency, Accrual Based Accounting, Implementation Challenges

## PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebagai sistem yang dirancang untuk mencatat, mengukur, dan melaporkan aktivitas keuangan entitas pemerintah, akuntansi sektor publik berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran serta memastikan bahwa dana publik digunakan secara tepat sasaran. Seperti yang dikemukakan oleh Dito, "Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah esensi utama dari akuntansi sektor publik." (DITO ADHITIA DARMA NASUITON, 2019). Dengan transparansi yang tinggi, masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran pemerintah, sedangkan akuntabilitas memungkinkan aparat pemerintah mempertanggung jawabkan setiap kebijakan keuangan yang diambil.

Dalam konteks penganggaran daerah, akuntansi sektor publik menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun tidak hanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi juga selaras dengan peraturan yang berlaku. Menurut (DR SISKA, 2022), anggaran daerah merupakan proses perencanaan yang krusial dalam pengelolaan keuangan publik, yang berfungsi sebagai alat alokasi sumber daya dan pengendalian pengeluaran guna mencapai tujuan pembangunan daerah. Anggaran terdiri dari berbagai jenis, seperti anggaran operasi yang mencakup pengeluaran rutin dan anggaran modal yang berorientasi pada investasi jangka panjang. Dalam penyusunannya, pemerintah daerah harus melalui beberapa tahap, mulai dari perencanaan, pengesahan, pelaksanaan, hingga evaluasi, yang semuanya harus mematuhi regulasi serta standar akuntansi yang berlaku.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penganggaran daerah adalah anggaran berbasis kinerja, di mana alokasi dana dikaitkan dengan hasil yang terukur. Dengan pendekatan ini, efektivitas penggunaan anggaran dapat dievaluasi berdasarkan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, penerapan akuntansi berbasis akrual juga menjadi aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah karena memungkinkan pengakuan pendapatan dan belanja dilakukan saat terjadi transaksi, bukan hanya ketika kas diterima atau dikeluarkan. Hal ini memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi keuangan daerah, yang pada akhirnya membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat.

Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip akuntansi sektor publik dalam penganggaran daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah rendahnya pemahaman aparat pemerintah terhadap sistem akuntansi berbasis akrual, yang menyebabkan kurangnya keselarasan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi sektor publik menjadi hambatan dalam penerapan sistem yang lebih efektif. Tantangan lainnya meliputi keterbatasan teknologi informasi yang mendukung sistem pencatatan keuangan daerah, kompleksitas proses birokrasi yang dapat memperlambat implementasi sistem akuntansi yang lebih transparan, serta intervensi politik yang sering kali menyebabkan pengalokasian anggaran tidak sepenuhnya berbasis pada kebutuhan masyarakat, melainkan lebih kepada kepentingan tertentu (Yafie, 2019).

Selain itu, perubahan regulasi yang sering terjadi juga menjadi tantangan dalam penerapan akuntansi sektor publik dalam penganggaran daerah. Ketidakstabilan regulasi menyebabkan pemerintah daerah harus terus menyesuaikan praktik akuntansi mereka dengan peraturan yang berlaku, yang pada akhirnya dapat menghambat konsistensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang tidak hanya memudahkan pemerintah daerah dalam menjalankan praktik akuntansi sektor publik, tetapi juga dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip akuntansi sektor publik diterapkan dalam proses

penganggaran daerah serta mengkaji dampaknya terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan utama dalam implementasi akuntansi sektor publik dan mencari solusi untuk meningkatkan efektivitasnya. Dengan memahami berbagai kendala dan peluang yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya memperbaiki sistem akuntansi sektor publik agar lebih optimal dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif kepustakaan (library research), yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber literatur yang relevan. Metode ini bertujuan untuk memahami penerapan akuntansi sektor publik berbasis akrual dalam penganggaran daerah melalui kajian terhadap jurnal akademik, buku, regulasi pemerintah, serta laporan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari sumber sekunder yang mencakup publikasi ilmiah, dokumen resmi pemerintah, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas implementasi akuntansi berbasis akrual di berbagai daerah. Seluruh data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis), di mana peneliti mengidentifikasi pola, tantangan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

Pendekatan kualitatif dalam studi kepustakaan ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengadopsi sistem akuntansi berbasis akrual serta menawarkan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitasnya. (Ridwan et al., 2021)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penerapan Akuntansi Sektor Publik dalam Penganggaran Daerah

Penerapan akuntansi sektor publik dalam penganggaran daerah telah mengalami perkembangan yang signifikan, terutama sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Sistem akuntansi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan, penerapan akuntansi berbasis akrual di berbagai daerah telah menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang menyatakan bahwa akuntansi berbasis akrual meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran serta memperkuat kontrol internal pemerintah daerah (Sony, 2016). Namun, implementasi sistem ini masih menghadapi berbagai kendala yang perlu diatasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.

### 2. Efektivitas Akuntansi Berbasis Akrual dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Salah satu manfaat utama dari penerapan akuntansi berbasis akrual adalah kemampuannya dalam menyajikan laporan keuangan yang lebih komprehensif, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat oleh pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri menunjukkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual telah meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, terutama dalam aspek pengakuan pendapatan dan belanja yang lebih akurat dibandingkan dengan sistem berbasis kas (Niu et al., 2014). Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas sistem akrual masih sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur pendukung serta kompetensi sumber daya manusia yang mengelolanya.

### 3. Tantangan dalam Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual

Meskipun memiliki berbagai manfaat, penerapan akuntansi berbasis akrual dalam penganggaran daerah masih menghadapi beberapa tantangan. Beberapa kendala utama yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain:

#### Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Banyak pemerintah daerah yang masih kekurangan tenaga ahli yang memiliki pemahaman mendalam tentang akuntansi berbasis akrual. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan

dalam pencatatan transaksi keuangan dan kurangnya keselarasan dalam pelaporan keuangan daerah (Yafie, 2019)

### **Keterbatasan Infrastruktur Teknologi**

Implementasi akuntansi berbasis akrual memerlukan sistem informasi yang canggih dan terintegrasi. Namun, beberapa daerah masih mengalami keterbatasan dalam infrastruktur teknologi, yang menyebabkan ketidakefektifan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan (Maryati et al., 2015).

### **Kompleksitas Proses Birokrasi**

Proses birokrasi yang kompleks sering kali memperlambat adopsi sistem akuntansi berbasis akrual. Banyak daerah yang masih bergantung pada sistem manual dalam pencatatan keuangan, yang dapat meningkatkan risiko kesalahan dan inefisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

### **Intervensi Politik dalam Penganggaran**

Salah satu tantangan utama dalam penerapan akuntansi sektor publik adalah intervensi politik dalam proses penganggaran daerah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keputusan anggaran tidak selalu didasarkan pada kebutuhan masyarakat, melainkan lebih kepada kepentingan politik tertentu.. Hal ini menghambat penerapan sistem akuntansi yang lebih transparan dan akuntabel (Dkk, 2023)

## **4. Solusi untuk Meningkatkan Efektivitas Akuntansi Sektor Publik dalam Penganggaran Daerah**

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain:

### **Peningkatan Kompetensi SDM**

Pemerintah daerah perlu mengadakan pelatihan dan sertifikasi bagi aparatur yang bertanggung jawab dalam pencatatan keuangan guna meningkatkan pemahaman mereka terhadap sistem akuntansi berbasis akrual.

### **Penguatan Infrastruktur Teknologi**

Investasi dalam teknologi informasi yang mendukung sistem pencatatan keuangan yang lebih modern dan terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah.

### **Simplifikasi Proses Birokrasi**

Penyederhanaan prosedur administrasi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan dapat mempercepat adopsi sistem akuntansi berbasis akrual serta meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

### **Penguatan Regulasi dan Pengawasan**

Diperlukan regulasi yang lebih tegas serta pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik.

## **5. Dampak Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah**

Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Dengan sistem ini, pemerintah daerah dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih komprehensif dan akurat, yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Selain itu, dengan adanya sistem yang lebih transparan, potensi penyalahgunaan anggaran dapat diminimalkan, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah meningkat (DR SISKA, 2022).

## **SIMPULAN**

Akuntansi sektor publik memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks ini, akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencatat dan melaporkan aktivitas keuangan, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang membantu pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengalokasikan sumber daya secara efektif. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, telah

membawa perubahan signifikan dalam cara pemerintah daerah menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

Melalui akuntansi berbasis akrual, pemerintah daerah dapat mencatat pendapatan dan belanja saat transaksi terjadi, bukan hanya saat kas diterima atau dikeluarkan. Hal ini memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi keuangan daerah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Penerapan sistem ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan anggaran, meningkatkan efisiensi, dan meminimalkan risiko penyalahgunaan keuangan publik.

Meski demikian, implementasi akuntansi sektor publik dalam penganggaran daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya pemahaman aparat pemerintah terhadap sistem akuntansi berbasis akrual. Banyak pegawai yang belum memiliki kompetensi yang memadai, yang dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi yang mendukung sistem pencatatan keuangan juga menjadi kendala, mengingat banyak daerah masih menggunakan metode manual yang kurang efisien. Kompleksitas proses birokrasi dan intervensi politik dalam penganggaran juga berkontribusi terhadap tantangan ini. Keputusan anggaran sering kali tidak didasarkan pada kebutuhan masyarakat, melainkan lebih kepada kepentingan tertentu, yang menghambat penerapan sistem akuntansi yang lebih transparan dan akuntabel. Di samping itu, perubahan regulasi yang sering terjadi juga menyebabkan ketidakstabilan dalam praktik akuntansi, yang dapat menghambat konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, penelitian ini mengidentifikasi beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas akuntansi sektor publik dalam penganggaran daerah. Pertama, peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi sangat penting. Kedua, investasi dalam infrastruktur teknologi informasi yang lebih modern dan terintegrasi dapat membantu meningkatkan efisiensi pencatatan dan pelaporan keuangan. Ketiga, penyederhanaan proses birokrasi akan mempercepat adopsi sistem akuntansi berbasis akrual dan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Terakhir, penguatan regulasi dan pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan akuntansi sektor publik dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan sistem akuntansi sektor publik, serta menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- DITO ADHITIA DARMA NASUITON. (2019). AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK. In FUNGKY (Ed.), *Uwais Inspirasi Indonesia* (1st ed.). UWAIS INSPIRASI INDONESIA.
- Dkk, K. (2023). Akuntansi Sektor Publik. In C. Dr. Rico Nur Ilham, S.E., M.M., RSA. (Ed.), *Akuntansi Sektor Publik*. Eureka Media Aksara bekerjasama.
- DR SISKA, D. (2022). Akuntansi Sektor Publik Lingkup AKuntansi Sektor Publik. In SAPARUDDIN (Ed.), *Universitas Gadjah Mada*. Yogyakarta (1st ed.). PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOG.
- Maryati, U., Yentifa, A., & Andriani, W. (2015). Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kota Bandar Lampung). *Akuntansi Dan Manajemen*, 10(2), 1–10. <https://doi.org/10.30630/jam.v10i2.100>
- Niu, F. A. L., Karamoy, H., & Tangkuman, S. (2014). Analisis penerapan PP. NO. 71 Tahun 2010 dalam penyajian laporan keuangan dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota kotamaibagu. *Jurnal Riset Ekonomi, Managemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 2(71), 714–722. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/embu/article/view/6461>
- Ridwan, M., AM, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42. <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>
- Sony. (2016). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*, 4(1), 223–230.

- suryo Pratolo, Rizal Yaya, H. S. (2016). *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah* (Vol. 53, Issue 9).
- Yafie, M. D. (2019). PENERAPAN BASIS AKRUAL PADA STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN INDONESIA. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–24.